

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme terciptanya model pengawasan partisipatif Bawaslu khususnya pada Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan kampanye pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya, tidak hanya itu penelitian ini juga melihat evaluasi atau efektivitas model pengawasan partisipatif Bawaslu Tasikmalaya dalam perspektif organisasi/lembaga yang terlibat dalam pengawasan partisipatif dengan menggunakan perspektif/teori Model Pengawasan Partisipatif Gunawan Suswantoro. Penelitian ini dilandasi oleh besarnya potensi terjadinya pelanggaran di Kota Tasikmalaya yang mana hal tersebut ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa barat dengan didukung oleh kenaikan pemilih sebesar 12% dibandingkan pemilu tahun 2019, penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan studi kasus melalui proses *indepth interview* dengan *purposive sampling* dan didukung oleh kajian dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif dalam tahapan kampanye pemilu 2024 Bawaslu Kota Tasik hanya melaksanakan 2 model yaitu Model Pengawasan Partisipatif Meluas dan Model Pengawasan Partisipatif Terbatas dan berupa kegiatan sosialisasi dan juga mobil pojok pengawasan yang mana diukur melalui teori Model Pengawasan Partisipatif Gunawan Suswantoro. Serta melihat bahwa rendahnya pengawasan partisipatif di Kota tasikmalaya di dasarkan oleh 2 faktor yaitu faktor ekonomi dan tingginya masyarakat urban , oleh karena itu hal tersebut melihat dampak dengan terlaksana kegiatan pengawasan partisipatif ini dikatakan belum optimal dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Tasikmalaya dan juga kegiatan pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya cenderung berifat eksklusif dari hotel ke hotel dan tidak sampai ke masyarakat kelas bawah.

Kata Kunci : Pemilu, Bawaslu, Pengawasan Partisipatif

ABSTRACT

This research discusses the mechanism for the creation of Bawaslu's participatory supervision model, especially in the Tasikmalaya City Bawaslu in supervising and preventing violations in the 2024 election campaign stage in Tasikmalaya City, not only that this study also looks at the evaluation or effectiveness of the Tasikmalaya Bawaslu participatory supervision model in the perspective of organizations / institutions involved in participatory supervision using the perspective / theory of Gunawan Suswanto's Participatory Supervision Model. This research is based on the high potential for violations in Tasikmalaya City which was determined by the West Java Provincial Bawaslu supported by a 12% increase in voters compared to the 2019 election, this research uses a cubic method with a case study approach through an in-depth interview process with purposive sampling and supported by documentation review.

The results of the research that have been carried out by the researcher are that in carrying out participatory supervision activities in the 2024 election campaign stage, the Tasik City Bawaslu only carries out 2 models, namely the Extended Participatory Supervision Model and the Limited Participatory Supervision Model and in the form of socialization activities and also the supervision corner car, which is measured through the theory of the Gunawan Suswanto Participatory Supervision Model. As well as seeing that the low level of participatory supervision in Tasikmalaya City is based on 2 factors, namely economic factors and the high level of urban communities, therefore it sees the impact of the implementation of this participatory supervision activity is said to be not optimal because there is still low awareness of the people of Tasikmalaya City and also the participatory supervision activities carried out by the Tasikmalaya City Bawaslu tend to be exclusive from hotel to hotel and do not reach to the lower class.

Key Word: Electoral , Bawaslu , Participatory Supervision.